

# PERANAN SATPOL PP DALAM PENGAMANAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT

Nazly Safira Bafadal

NPP 30.1554

*Asdaf Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya*

*Program Studi Perpolisian Tata Pamong, Fakultas Perlindungan Masyarakat*

*Institut Pemerintahan Dalam Negeri*

Email: [nazlysafirabafadhal2161@gmail.com](mailto:nazlysafirabafadhal2161@gmail.com)

## ABSTRACT

**Problem Statement/ Background** : Indonesia is one of the countries with the largest archipelago in the world. One of the islands that has a wealth of marine life comes from the tip of Indonesia, namely West Papua Province, Raja Ampat Regency, a wealth of marine life owned by Raja Ampat Regency, so that attract foreign tourists to visit. To avoid and protect tourist attractions from things that disturb peace and order, security is needed by Satpol PP Raja Ampat Regency. **Purpose** : This study aims to find out and describe how the role of Satpol PP in securing tourist attractions in Raja Ampat Regency. Knowing what are the obstacles in the implementation of Tourist Attraction Security and knowing how the role of Satpol PP in overcoming and dealing with obstacles that arise. **Method** : The method used in this research is a qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. **Result** : The results of this study show that obstacles in securing tourist attractions in Raja Ampat Regency are limited facilities and infrastructure supporting the apparatus, low level of community participation in securing tourist attractions. **Conclusion**: In general, the role of Satpol PP in securing tourist attractions in Raja Ampat Regency is going well, it's just not optimal, it's just that it still has several obstacles that must be swiftly overcome by Satpol PP Raja Ampat Regency, West Papua Province.

**Keywords** : The Role of Satpol PP, Security of Tourist Attractions

## ABSTRAK

**Permasalahan/ Latar Belakang (GAP)** : Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Salah satu pulau yang memiliki kekayaan biota laut berasal dari

ujung Indonesia yaitu Provinsi Papua Barat Kabupaten Raja Ampat, kekayaan biota laut yang dimiliki oleh Kabupaten Raja Ampat, sehingga menarik wisata asing untuk berkunjung. Untuk menghindari dan melindungi objek wisata dari hal-hal yang mengganggu ketentraman dan ketertiban maka di perlukan pengamanan oleh Satpol PP Kabupaten Raja Ampat. **Tujuan** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran Satpol PP dalam mengamankan tempat wisata di Kabupaten Raja Ampat. Mengetahui apa saja menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pengamanan Objek Wisata dan mengetahui bagaimana Peranan dari Satpol PP dalam mengatasi dan menghadapi hambatan yang muncul. **Metode** : Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil** : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan dalam pengamanan tempat wisata di Kabupaten Raja Ampat ialah terbatasnya sarana dan prasarana penunjang aparatur, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengamankan tempat wisata. **Kesimpulan** : Secara umum, Peran Satpol PP dalam Pengamanan Tempat Wisata di Kabupaten Raja Ampat berjalan dengan baik hanya saja belum maksimal hanya saja masih memiliki beberapa hambatan yang harus dengan sigap diatasi oleh Satpol PP Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.

**Kata Kunci** : Peran Satpol PP, Keamanan Tempat Wisata

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu negara dengan kepulauan terbesar adalah Indonesia. Melalui informasi yang dibagikan Focal Department of Measurement dari Kajian Implementasi Kebijakan, Dinas Dalam Negeri, bahwa Indonesia memiliki 17.504 pulau yang tersebar di 32 wilayah di Indonesia. Papua Barat dengan banyak pulau 1.945 berada di urutan kedua provinsi dengan jumlah pulau terbanyak. Industri pariwisata berpotensi menjadi penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah minyak dan gas. (Rosmha Widiyati, 2021)

Raja Ampat adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua Barat. Waisai adalah ibu kota kabupaten dengan 610 pulau dengan julukan bahari. Raja Ampat memiliki 4 pulau besar, Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misool. Masing-masing pulau ini memiliki keistimewaan sehingga menjadikan Raja Ampat sebagai tujuan wisata yang populer bagi pengunjung.

Namun, dalam tiga tahun terakhir, jumlah wisatawan dari seluruh dunia yang berkunjung ke Raja Ampat mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan pariwisata dan juga kerusakan lingkungan, antara lain : Pertama, sebagian besar sampah yang ada di perairan Raja Ampat berasal dari wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut. Kedua, mayoritas masyarakat Kepulauan Raja Ampat adalah nelayan dengan tingkat pendidikan rendah yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap menjaga lingkungan, serta keamanan dan kenyamanan publik. Ketiga, meningkatnya intensitas konflik kepentingan antar nelayan lokal dan nelayan luar yang mempengaruhi peningkatan praktis perikanan dan kemajuan industri perjalanan laut di Raja Ampat.

Selain dari itu, mayoritas masyarakat adat yang tinggal di pulau-pulau kecil di Raja Ampat melakukan praktik-praktik yang merusak lingkungan, seperti menangkap ikan dengan bahan peledak dan membuang sampah sembarangan (Pyanjung, 2018). Yusdi Lamatenggo, penanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, mengatakan hal ini sebagai berikut: "Illegal fishing di Raja Ampat saat ini masih menjadi masalah. Para nelayan yang menggunakan bom ikan adalah musuh kita di daerah ini. Nelayan nakal bisa dengan mudah masuk ke wilayah kita," (11/1/2022).

Dengan semakin berkembangnya penyelenggaraan kepariwisataan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, serta penumbuhan, pemberdayaan dan pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Raja Ampat perlu ditata dan dikelola dengan baik, sehingga dapat berimplikasi pada iklim investasi yang baik dan kompetitif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukannya menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan ekosistem di perairan Kepulauan Raja Ampat. Maka, Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata melalui Satpol PP wajib melakukan pengamanan objek wisata. Satpol PP merupakan instansi penyelenggara urusan ketentraman dan ketertiban umum yang berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

Satpol PP dan Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat pada hari libur tertentu, seperti hari raya keagamaan atau hari besar lainnya, turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan dan pengawasan turis domestik maupun mancanegara terutama berkaitan dengan pembayaran karcis/tiket masuk destinasi objek wisata seperti di Piaynemo, Pulau Wayag, Pasir Timbul, Kampung Wisata Arborek. Satpol PP Kabupaten Raja Ampat juga bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mengamankan objek wisata dari gangguan alcohol/miras, narkoba, tindakan

asusila, dan kejahatan lainnya seperti pencurian, pemerasan dan lain-lain. Anggota masyarakat, aparat dan/atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) akan dikenakan sanksi non yustisial.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya merupakan tolak ukur seorang peneliti dalam menulis dan menemukan inspirasi baru, selain itu kajian tersebut memiliki focus yang sama, teori atau regulasi yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan focus penelitian. Berikut penelitian sebelumnya tentang implementasi kebijakan kota layak anak di Indonesia yang diangkat sebagai referensi dalam bahan kajian penelitian : 1) Dian Pertiwi mengenai Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Menertibkan Objek Wisata Pantai Purus Kota Padang/ 2014; 2) Rindu Pane dalam tulisannya Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima atas Penyalahgunaan Ruang Publik Di Area Objek Wisata Gentala Arsy di Kota JAMBI/ 2022; 3) Aditia Heriyantara dengan judul penelitian Pengelolaan Sapta Pesona di Objek Wisata Pantai Padang/ 2015; dan 4) Wati Anida dengan penelitian berjudul Peranan Objek Wisata Talang Indah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat/2018. Terdapat perbedaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu perbedaan teori dan metode penelitian yang digunakan, serta lokus dari penelitian yang dilakukan.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang memiliki perbedaan dan belum dilakukan penelitian terdahulu, pada penelitian yang dilakukan oleh Dian Pertiwi yang berjudul “Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Menertibkan Objek Wisata Pantai Purus Kota Padang”, membahas fokus terhadap Pengawasan terhadap pedagang kaki lima dari Satpol PP Kota Padang.

Penelitian yang dilakukan oleh Rindu Pane berjudul “Penegakkan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima atas Penyalahgunaan Ruang Publik di Area Objek Wisata Gentala Arsy di Kota Jambi” menganalisa menggunakan teori implementasi kebijakan yang jelas berbeda dengan yang dilakukan peneliti dengan menggunakan teori pengamanan terkait dengan judul pengamanan objek wisata

Penelitian yang dilakukan oleh Aditia Heriyantara yang berjudul “ Pengelolaan Sapta Pesona di Objek Wisata Pantai Pedagang” membahas terkait Pengelolaan Sapta Pesona di Objek Wisata.

## **1.5. Tujuan**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Satpol PP dalam pengamanan objek wisata, mengetahui faktor hambatan Satpol PP dalam pengamanan objek wisata dan mengetahui upaya Satpol PP dalam pengamanan objek wisata Kabupaten Raja Ampat.

## **II. METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan deskriptif dan analisis data secara induktif. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif tersebut, penulis bisa mencari tahu fakta-fakta yang ada di lapangan tentang Perana Satpol PP dalam Pengamanan Obyek Wisata di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Obyek Wisata di Kabupaten Raja Ampat. Untuk melengkapi dan menjelaskan metode penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan □ocal□ pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara yang dilakukan dengan 5 informan, serta dokumentasi.

Wawancara kepada 5 informan antara lain Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, dan Kepala Bidang Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sebagai perangkat daerah yang membantu Pemerintah Daerah dalam pengamanan objek wisata di Kabupaten Raja Ampat, serta masyarakat atau pemilik tempat wisata atau pengunjung yang ada di Kabupaten Raja Ampat.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemberdayaan masyarakat sekitar tempat wisata merupakan salah satu bentuk peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Raja Ampat dalam pengamanan objek wisata. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Satpol PP Kabupaten Raja Ampat melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengamanan objek wisata. Masyarakat diberi kesempatan untuk menjadi sukarelawan dalam lokal lokal Satpol PP Kabupaten Raja Ampat. Dalam kegiatan lokal ini, masyarakat diajarkan tentang tata cara lokal dan memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di sekitar objek wisata.

Dengan pemberdayaan masyarakat sekitar tempat wisata, Satpol PP Kabupaten Raja Ampat tidak hanya menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat lokal serta memperhatikan lingkungan dan budaya setempat.

### **3.1 Pengamanan Objek Wisata**

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP membuat kebijakan dan strategi pengamanan kawasan pariwisata dengan cara melibatkan masyarakat di daerah wisata sebagai bentuk dari kebijakanyang dibuat, dengan dasar masyarakat yang potensial memiliki hak untuk dikonsultasikan. Namun, dalam pelaksanaannya Satpol PP masih mengalami kendala dalam kebijakan pengamanan yang ada baik dari struktur operasional dalam pelaksanaan pengamanan sehingga Satpol PP Kabupaten Raja Ampat tidak langsung terjun kedalam pengamanan melainkan harus berkordinasi dengan Dinas Pariwisata terlebih dahulu maupun dari pemberdayaan masyarakat/pam swakarsa hal ini membuat kegiatan pengamanan objek wisata tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Akan tetapi dari segi strategi pengamanan kawasan pariwisata dalam pelaksanaannya sudah memiliki peningkatan. Strategi pengamanan ini terpusat di titik tertentu yang sering terjadi kegaduhan yang mengakibatkan terganggunya ketenraman dan ketertiban masyarakat di kawasan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat. Pelaksanaan pengamanan objek wisata oleh Satpol PP Kabupaten Raja Ampat menggunakan teknik represif yaitu kegiatan pengamanan dalam rangka penanggulangan dilakukan dengan penyergapan, penggerebekan, penggeladahan, penyitaan, penyidikan, dan proteksi bertingkat, serta pengadilan. Beberapa objek wisata di raja ampat yang dikunjungi baik dari wisatawan asing maupun lokal dalam penanganan konflik masih kewalahan. Oleh sebab itu, pelaksanaan pengamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Raja Ampat terpusat pada tempat-tempat tertentu, yaitu:

1. Tempat parkir yang menyalahi aturan dan mengganggu akses jalan pengunjung, serta penataan parkir yang melebihi kapasitas. Oleh karena itu, tindakan yang diberikan oleh Satpol PP Kabupaten Raja Ampat berupa teguran dan pembinaan di tempat.
2. Tempat pembelian tiket/karcis, Satpol pp bersama bhabinkamtibmas dan kp3 laut membantu administrator Pelabuhan dalam menyelenggarakan keamanan di dalam daerah Pelabuhan sepanjang mengenai tata tertib umum. Hal ini salah satu bentuk strategi pengamanan objek wisata di kabupaten raja ampat sesuai dengan tugas dan tupoksi

- trantibum dengan mengkoordinasikan pelaksanaan memfasilitasi pengendalian keamanan dan ketertiban umum.
3. Pintu masuk dan/atau keluar dan daerah rawan bencana, pengawasan pintu masuk ke destinasi wisata khususnya dermaga oleh satpol pp dilakukan dengan cara patroli ke tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Hal ini menunjukkan bahwa peran satpol pp dalam pengamanan objek wisata ini cukup penting, tetapi pelaksanaan kegiatan ini hanya di laksanakan di hari-hari tertentu yang mana tidak menjadi program kegiatan Satpol PP Kabupaten Raja Ampat.
  4. Pemberdayaan pengamanan swakarsa sekitar tempat wisata merupakan salah satu bentuk peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Raja Ampat dalam pengamanan objek wisata. Pemberdayaan pengamanan swakarsa dilakukan melalui pengorganisasian dan pelatihan masyarakat sekitar objek wisata untuk membentuk Satuan Pengamanan Swakarsa yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar objek wisata. melakukan patroli di sekitar objek wisata. Satpol PP Kabupaten Raja Ampat mengambil tindakan mediasi atau pertemuan kedua belah pihak yang sedang berkonflik untuk menyelesaikan konflik di wilayahnya. Selain itu, Satpol PP Kabupaten Raja Ampat juga berhak memberikan tindakan non yustisial.
  5. Bimbingan dan penyuluhan keamanan merupakan salah satu bentuk peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Raja Ampat dalam pengamanan objek wisata. Dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan keamanan, Satpol PP Kabupaten Raja Ampat melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak yang sedang berkonflik dengan komunikasi persuasif, serta memberikan pemahaman tentang peraturan dan tata cara pengamanan di sekitar objek wisata kepada masyarakat.

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam melakukan bentuk pengamanan terhadap objek wisata yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Raja Ampat terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaannya, yaitu :

1. Keterbatasan Anggaran, agar terlaksananya program pengamanan objek wisata memerlukan anggaran yang stabil karena dilihat dari sarana dan prasarana yang ada di kantor satpol pp kabupaten raja ampat sudah banyak yang rusak khususnya speed boat untuk melakukan patroli ke pulau-pulau yang menjadi tujuan wisata. Kendala anggaran ini secara umum yaitu karena oprasional tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja hanya didapat oleh APBD yang membuat pelaksanaan operasional masih terkendala.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, dimana jumlah personal anggota Satpol PP yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat yang jika diambil jumlah ideal personal dibutuhkan minimal 20 orang tiap kecamatan begitupun dengan kualitas personal yang mayoritas hanya lulusan SMA tanpa kompetensi tertentu yang dimiliki dalam menjalankan tugas.
3. Keterbatasan Fasilitas/Sarana dan Prasarana, yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Raja Ampat memadai untuk kegiatan pengamanan objek wisata di kabupaten raja ampat. Fasilitas yang dimiliki berupa kendaraan mobil dalmas 1 buah, kendaraan mobil patroli 1 buah, dan kendaraan roda dua 2 buah sementara harus ada 1 1 kecamatan yang harus dipantau setiap harinya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Raja Ampat.

#### IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Raja Ampat dalam pelaksanaan visinya, salah satunya pengamanan pada objek wisata sudah dilakukan walau belum optimal. Hal ini dikarenakan pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar tempat wisata belum maksimal karena kurangnya peran masyarakat untuk aktif membantu mengamankan, pemberdayaan pengamanan swakarsa yang belum dilakukan dengan baik, serta bimbingan dan penyuluhan keamanan yang perlu ditingkatkan lagi. Selain itu ada juga yang menghambat pengamanan objek wisata oleh Satpol PP.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan sarana dan prasarana, serta tumpang tindih tugas pelaksanaan pengamanan objek wisata antara Satpol PP Kabupaten Raja Ampat dengan Polisi/KP3 Laut.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Raja Ampat dalam mengatasi faktor-faktor penghambat yakni dengan cara pengajuan anggaran khusus untuk program tersebut, penambahan personal melalui perekrutan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan serta melakukan perbaikan, penambahan dan pengadaan fasilitas pendukung.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Raja Ampat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013.
- Nazir, Moh. "Metode Penelitian, Cetakan Ke Tujuh." *Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia* (2011).
- Neuman, W Lawrence. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Indeks, 2016.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi : suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2019.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 1 ed. Bandung: ALFABETA, 2008.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumaryadi, I Nyoman, Agung B G B Indraatmaja, dan Novesto E Hutabarat. *Sosiologi pemerintahan: dari perspektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi, dan sistem kepemimpinan pemerintahan Indonesia*. Ghalia Indonesia, 2010.
- Susanto, Astrid S. *Pengantar sosiologi dan perubahan sosial*. Binacipta, 1983.
- Taneko, Soleman B. *Konsepsi sistem sosial dan sistem sosial Indonesia*. Fajar Agung, 1986.
- Utama, Lalu Satria, dan Abdul Rahman. *Representasi Sosial Pengendalian Covid 19*.
- Rindu Pane, "Penegakkan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima atas Penyalahgunaan Ruang Publik di Area Objek Wisata Gentala Arsy di Kota Jambi", 2022.
- Dian Pertiwi, "Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima dalam Menertibkan Objek Wisata Pantai Purus Kota Padang", 2014.
- Aditia Heriantara, "Pengelolaan Sapta Pesona di Objek Wisata Pantai Padang", 2015.